



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 180/331 /HUK/2023**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN**  
**BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO TIMUR**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab IV Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk merumuskan dan mematangkan kebijakan SPBE di Kabupaten Barito Timur perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Matriks Rencana Peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Barito Timur merupakan bahan evaluasi kinerja Tim Koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi dibantu Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Kabupaten Barito Timur.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 15 AGUSTUS 2023

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A. Y. MEBAS**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Wakil Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Kepada daftar nama/jabatan sebagaimana Lampiran I.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 180/331 /HUK/2023**  
**TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM**  
**PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN**  
**BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO TIMUR**

1. TIM PENGARAH

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Barito Timur	Ketua
2.	Wakil Bupati Barito Timur	Wakil Ketua

2. TIM KOORDINASI

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Koordinator

3. KELOMPOK KERJA

a. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
5.	Analisis Hukum Ahli Muda SALASANTO, S.H.	Anggota
6.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda NURMILA, S.H.	Anggota

b. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	Anggota
3.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	Anggota
5.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda HEVY SOPIAWATI, S.Sos.	Anggota

6.	Perencana Ahli Muda VERONIKA GALINGGING, S.P., M.A.P.	Anggota
7.	Perencana Ahli Muda HERRY IRWANTO, S.Kom., M.M.	Anggota
8.	Analisis Perhubungan dan Telekomunikasi SUSI SUSANTI, S.T., M.M.	Anggota
9.	DEDE ALMUSTAQIM, S.Kom.	Anggota

c. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Inspektur	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Anggota
3.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
5.	Inspektur Pembantu I	Anggota
6.	Inspektur Pembantu II	Anggota
7.	Inspektur Pembantu III	Anggota
8.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi	Anggota
11.	Penata Laksana Barang Ahli Muda ARAI MAEH MAYATI, S.Kom., M.A.P.	Anggota
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda EKA PANATARIANI, S.Sos.	Anggota
13.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda KOVA GINARTA, S.Sos., M.A.	Anggota
14.	Arsiparis Ahli Muda PUSPITA ARIANI, S.E.	Anggota
15.	Pranata Komputer Ahli Muda MAPRIYATNO, S.Kom., M.Si.	Anggota
16.	Auditor Ahli Madya WIDYA ARISONA, S.T., M.Si.	Anggota
17.	Analisis Sumber Daya IPTEK M. YUDHA MAULANA, S.Kom.	Anggota

d. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota

6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
10.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengadaan, Formasi, Mutasi, Pemberhentian, Pensiun, Informasi dan Data	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Anggota
15.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
16.	Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda	Anggota
17.	Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya Bapenda	Anggota
18.	Kepala Bidang Penanaman Modal Dispedal & PTSP	Anggota
19.	Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Dispedal & PTSP	Anggota
20.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda ABDUL GAPUR, S.P., M.M.	Anggota
21.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda M. YUFIUDDINNUR MIRZA, S.Kom., M.M.	Anggota
22.	Perencana Ahli Muda YULIE PATNIATY, SE., M.M.	Anggota
23.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran NAUZI FAHMI, S.Sos., M.Si.	Anggota
24.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda IDUNG, S.Sos., M.M.	Anggota
25.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda LISA SETIANI, S.AP.	Anggota
26.	Analisis Hukum Ahli Muda INDRIANI, SH	Anggota
27.	Pustakawan Ahli Muda MIHEWU DAYA HAWINO, S.Pd.	Anggota
28.	Pustakawan Ahli Muda NATALINA, S.E.	Anggota
29.	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penilaian LILY HERTIANI, S.E.	Anggota
30.	Kepala Sub Bidang Retribusi SURAINI S, SE., M.M.	Anggota
31.	Pengadministrasi Produk Hukum DEDI SUHADI ARDIWINATA, S.Sos.	Anggota
32.	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media THERESIA LIA DEWI, S.Sos.	Anggota
33.	Auditor Ahli Muda FITRIYANI, S.E.	Anggota
34.	Analisis Pelayanan Publik ARIO, S.Sos.	Anggota
35.	Analisis Aset Daerah NANA WARIATI, S.E., M.M.	Anggota
36.	Penganalisis Data dan Informasi SEVENRI, S.E.	Anggota

#### 4. SEKRETARIAT

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyelenggaraan E-Government	Ketua
2.	Pranata Komputer Ahli Muda FRISCIA ANTHONY, S.T.	Anggota
3.	Pengadministrasi Data INDAYANI, S.AP.	Anggota
4.	Pengadministrasi Persuratan MUHAMMAD SAMSUDIN	Anggota
5.	Pengelola Database ZULKIPLI	Anggota
6.	HERRY, S.Kom.	Anggota
7.	NURHIDAYATI	Anggota



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 180/231 /HUK/2023**  
**TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM**  
**PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

**TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN**  
**BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO TIMUR**

1. Tim Pengarah:
  - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
  - b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
  - c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
  - e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
  - f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
  - g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
2. Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan penerapan kebijakan internal SPBE;
  - b. mengkoordinasikan penerapan tata kelola SPBE;
  - c. mengkoordinasikan penerapan manajemen SPBE;
  - d. mengkoordinasikan layanan SPBE;
  - e. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - f. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3. Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:
    - 1) melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
    - 2) mengkoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
    - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
    - 4) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

- b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:
- 1) melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
  - 2) mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
  - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
  - 4) melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:
- 1) melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
  - 2) mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
  - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
  - 4) melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- d. Kelompok Kerja Layanan SPBE:
- 1) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
  - 2) mengkoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
  - 3) melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
  - 4) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
4. Sekretariat SPBE mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
  - b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur; dan
  - c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.



**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 180/331 /HUK/2023**  
**TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM**  
**PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

**MATRIKS RENCANA PENINGKATAN INDEKS SPBE KABUPATEN BARITO TIMUR**

<b>Domain/ Aspek/ Indikator</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Responsible</b> (Yang bertanggung jawab menjalankan/menyelesaikan tugas)	<b>Accountable</b> (Yang bertanggung jawab/memiliki otoritas menyetujui atas tugas)	<b>Consulted</b> (Dapat dikonsultasikan melalui)	<b>Informed</b> (Yang diinformasikan)	<b>Output</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Domain 1</b>	<b>Kebijakan Internal SPBE</b>					
<b>Aspek 1</b>	<b>Kebijakan Tata Kelola SPBE</b>					
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Tim Koordinasi SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Hukum Setda</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Kebijakan/pengaturan penerapan Arsitektur SPBE Kab. Barito Timur</i>
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Tim Koordinasi SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Hukum Setda</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Kebijakan/pengaturan penerapan Peta Rencana SPBE Kab. Barito Timur</i>
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	<i>Tim Koordinasi SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Hukum Setda</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Kebijakan/pengaturan penerapan Manajemen Data Kab. Barito Timur</i>
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	<i>Tim Koordinasi SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Hukum Setda</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Kebijakan/pengaturan penerapan Pembangunan Aplikasi SPBE Kab. Barito Timur</i>
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	<i>Tim Koordinasi SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Hukum Setda</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Kebijakan/pengaturan penerapan Layanan Pusat Data Kab. Barito Timur</i>
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat /Pemerintah Daerah	<i>Tim Koordinasi SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Hukum Setda</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Kebijakan/pengaturan penerapan Jaringan Intra Kab. Barito Timur</i>

1	2	3	4	5	6	7
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Tim Koordinasi SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Hukum Setda</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Kebijakan/pengaturan penerapan Sistem Penghubung Layanan Kab. Barito Timur</i>
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	<i>Tim Koordinasi SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Hukum Setda</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Kebijakan/pengaturan penerapan Manajemen Keamanan Informasi Kab. Barito Timur</i>
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	<i>Tim Koordinasi SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Hukum Setda</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Kebijakan/pengaturan pelaksanaan Audit TIK Kab. Barito Timur</i>
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Tim Koordinasi SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Hukum Setda</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Kebijakan/SK Tim Koordinasi SPBE</i>
<b>Domain 2</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>					
<b>Aspek 2</b>	<b>Perencanaan Strategis SPBE</b>					
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Bappedalitbang, Diskominfops Dan Bagian Organisasi Setda</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen penyusunan Arsitektur SPBE yang telah disahkan</i>
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Bappedalitbang Dan Bagian Organisasi Setda</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen Peta Rencana SPBE yang telah disahkan</i>
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	<i>Bappedalitbang Dan Diskominfops</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen konsultasi/koordinasi/prosedural proses perencanaan pada anggaran TIK Unit Kerja/Perangkat Daerah yang telah disahkan</i>
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	<i>Bagian Organisasi Setda</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen Peta Proses Bisnis berdasarkan Permenpanrb 19/2018 (Proses, Sub Proses, Peta Relasi dan CFM) yang telah disahkan, dan dilakukan rekayasa terhadap salah satu proses bisnis/layanan Instansi</i>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Aspek 3</b>	<b>Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>					
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	<i>Diskominfops</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait Pembangunan aplikasi SPBE yang berdasarkan siklus SDLC dikonsultasikan/terpadu di Diskominfops</i>
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	<i>Diskominfops</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pengelolaan Layanan Pusat Komputasi/ Kendali, SOP Layanan Pusat Data, Pemanfaatan Pusat Data Nasional, log penggunaan oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah</i>
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Diskominfops</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pemanfaatan Jaringan Intra Kab. Barito Timur oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah</i>
Indikator 18	Tingkat Tematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Diskominfops</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Kab. Barito Timur oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah</i>
<b>Aspek 4</b>	<b>Penyelenggara SPBE</b>					
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Tim Koordinasi SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait hasil pelaksanaan tugas yang telah diuraikan pada kebijakan Tim Koordinasi SPBE Kab. Barito Timur</i>
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	<i>Tim Koordinasi SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kolaborasi/kerja sama yang telah dilakukan Kab. Barito Timur dengan Kabupaten/Kota Lainnya dalam penerapan SPBE</i>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Domain 3</b>	<b>Manajemen SPBE</b>					<i>Program kerja/aktivitas seluruh Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK dituangkan dalam Peta Rencana SPBE</i>
<b>Aspek 5</b>	<b>Penerapan Manajemen SPBE</b>					
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	<i>Unit Kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR)</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Inspektorat</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen penerapan Manajemen Risiko SPBE yang telah disahkan (Sesuai Lampiran PermenPANRB 5/2020)</i>
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	<i>Diskominfo</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen penerapan Manajemen Manajemen Keamanan Informasi yang telah disahkan (Sesuai PerBSSN 4/2021)</i>
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	<i>Bappedalitbang dan Diskominfo</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen penerapan Manajemen Data yang telah disahkan (Sesuai PermenPPN/Bappenas 16/2020)</i>
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	<i>Diskominfo</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen penerapan Manajemen Aset TIK yang telah disahkan</i>
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	<i>BKPSDM dan Diskominfo</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang telah disahkan</i>
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	<i>Bappedalitbang, Disperpusip dan Diskominfo</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen penerapan Manajemen Pengetahuan yang telah disahkan</i>
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	<i>Bagian Organisasi Setda</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen penerapan Manajemen Perubahan yang telah disahkan</i>
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	<i>Diskominfo</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen penerapan Manajemen Layanan SPBE yang telah disahkan</i>
<b>Aspek 6</b>	<b>Pelaksanaan Audit TIK</b>					
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	<i>Inspektorat dan Diskominfo (Tim Audit Internal)</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen hasil Audit Internal dan Eksternal Infrastruktur yang sesuai pedoman (BRIN)</i>
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	<i>Inspektorat dan Diskominfo (Tim Audit Internal)</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen hasil Audit Internal dan Eksternal Aplikasi yang sesuai pedoman (BRIN)</i>

1	2	3	4	5	6	7
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	<i>Inspektorat dan Diskominfops (Tim Audit Internal)</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Kerja terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Dokumen hasil Audit Internal dan Eksternal Keamanan Infrastruktur dan Aplikasi yang sesuai pedoman (BSSN)</i>
<b>Domain 4</b>	<b>Layanan SPBE</b>					
<b>Aspek 7</b>	<b>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>					<i>(Screenshoot, manual book, dan video penggunaan aplikasi)</i>
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	<i>Bappedalitbang</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	<i>Bappedalitbang dan BPKAD</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	<i>BPKAD</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan Layanan Pengelolaan Keuangan Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan LPSE oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	<i>BKPSDM</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	<i>Disperpusip</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan SRIKANDI/ Aplikasi sejenis oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	<i>BPKAD</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan Layanan Pengelolaan BMN/D Elektronik oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	<i>Inspektorat</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<i>Bagian Organisasi Setda</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	<i>BKPSDM</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur</i>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Aspek 8</b>	<b>Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>					
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	<i>Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan SP4N Lapor/ Aplikasi sejenis oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	<i>Diskominfops</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	<i>Bagian Hukum Setda</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan JDIH oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	<i>Unit Kerja/Perangkat Daerah sektoral</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan Layanan Sektoral Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	<i>Unit Kerja/Perangkat Daerah sektoral</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan Layanan Sektoral Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur</i>
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	<i>Unit Kerja/Perangkat Daerah sektoral</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Diskominfops, Unit Kerja Terkait</i>	<i>Seluruh Unit Kerja terkait</i>	<i>Penerapan Layanan Sektoral Berbasis Elektronik oleh Kab. Barito Timur</i>

